

Kelembagaan Ekonomi Desa dan Skala Transformasi Lokal: Studi Komparatif Penguatan BUM Desa di Bojonegoro dan Ekosistem Smart Kampung Banyuwangi

Fathan Malik ¹

Pusat Studi Perlindungan Sosial dan Ekonomi Regional, Indonesia

Korespondensi Email : fathan.malik@researchmail.id

Abstract :

This article compares two local governance pathways for strengthening village economies in Indonesia: BUM Desa institutional strengthening in Bojonegoro and the Smart Kampung ecosystem in Banyuwangi. Rather than treating village economic institutions as isolated entities, the article argues that their effectiveness depends on the surrounding governance ecosystem. Using comparative qualitative analysis based on official village economy statistics, ministerial datasets, and district policy documents from 2024–2026, the study shows that Bojonegoro emphasizes organizational strengthening of village-owned enterprises through digital reporting, mentoring, and food-security-linked business models, whereas Banyuwangi embeds village economic activities within a broader digitally enabled service-and-empowerment architecture. Nationally, Kemendesa reports more than 73,000 BUM Desa and BUM Desa Bersama, but performance remains uneven. The findings indicate that village economic institutions create stronger local development effects when they are linked to market access, digital administration, and district-level coordination. The article contributes to applied business and economic research by shifting the focus from BUM Desa existence toward institutional performance mechanisms. It proposes that leadership support, administrative digitalization, and productive linkage to local value chains determine whether village institutions become symbolic entities or genuine engines of local economic transformation.

Keywords : *village economy, BUM Desa, local development, institutional performance, rural governance.*

Abstrak :

Artikel ini membandingkan dua jalur tata kelola dalam penguatan ekonomi desa di Indonesia: penguatan kelembagaan BUM Desa di Bojonegoro dan ekosistem Smart Kampung di Banyuwangi. Alih-alih memperlakukan institusi ekonomi desa sebagai entitas yang berdiri sendiri, artikel ini berargumen bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada ekosistem tata kelola yang mengitarinya. Dengan menggunakan analisis kualitatif komparatif berbasis statistik resmi ekonomi desa, dataset kementerian, dan dokumen kebijakan kabupaten periode 2024–2026, studi ini menunjukkan bahwa Bojonegoro menekankan penguatan organisasi BUM Desa melalui pelaporan digital, pendampingan, dan model bisnis yang dikaitkan dengan ketahanan pangan, sementara

Banyuwangi menanamkan aktivitas ekonomi desa ke dalam arsitektur layanan dan pemberdayaan berbasis Smart Kampung. Secara nasional, Kemendesa melaporkan lebih dari 73 ribu BUM Desa dan BUM Desa Bersama, tetapi performanya sangat beragam. Temuan menunjukkan bahwa institusi ekonomi desa menghasilkan dampak pembangunan lokal yang lebih kuat ketika terhubung dengan akses pasar, administrasi digital, dan koordinasi tingkat kabupaten.

Kata kunci: *ekonomi desa, BUM Desa, pembangunan lokal, kinerja kelembagaan, tata kelola perdesaan*

Pendahuluan

Perdebatan mengenai pembangunan desa sering kali terlalu fokus pada dana dan infrastruktur, sementara kelembagaan ekonomi lokal kurang diperhatikan. Padahal, dalam pendekatan institutional development, pembangunan lokal berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan institusi desa mengorganisasi aset, mengurangi biaya koordinasi, dan menghubungkan produksi lokal dengan pasar (Ostrom, 1990; North, 1990). Di Indonesia, BUM Desa diharapkan menjadi instrumen utama untuk tujuan tersebut. Namun, keberadaan formal BUM Desa belum tentu identik dengan performa ekonomi.

Kemendesa mencatat bahwa hingga 31 Maret 2026 terdapat sekitar 73.085 BUM Desa dan BUM Desa Bersama secara nasional. Pada saat yang sama, Kemendesa juga mengembangkan sistem pemeringkatan berbasis aspek kelembagaan, manajemen, usaha, kemitraan, akuntabilitas, manfaat bagi masyarakat, dan penguatan aset serta modal. Fakta ini menunjukkan bahwa problem utama nasional bukan lagi pembentukan kelembagaan, melainkan kualitas performanya (Kemendesa, 2024; Kemendesa, 2026).

Literatur terdahulu tentang BUM Desa menunjukkan hasil campuran. Sejumlah studi menemukan bahwa BUM Desa dapat mendukung pendapatan lokal dan indeks pembangunan desa, tetapi bukti dampaknya terhadap transformasi ekonomi desa masih lemah dan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, jejaring usaha, serta kapasitas manajerial (Terlouw et al., 2023; studi-studi domestik 2020–2025). Dengan kata lain, banyak BUM Desa berhenti pada formalitas organisasi.

Artikel ini memilih Bojonegoro dan Banyuwangi karena keduanya mewakili dua pendekatan berbeda. Bojonegoro memperlihatkan strategi penguatan BUM Desa yang lebih eksplisit, termasuk digitalisasi pelaporan melalui SIBUMBo, rekrutmen pendamping BUM Desa, serta integrasi BUM Desa dengan program ketahanan pangan seperti GAYATRI. Banyuwangi, sebaliknya, menampilkan pendekatan yang lebih ekosistemik melalui Smart Kampung, di mana layanan digital desa dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal dan pelayanan publik yang terdesentralisasi (Bojonegoro, 2025; Banyuwangi, 2026).

Research gap artikel ini terletak pada keterbatasan studi komparatif yang melihat ekonomi desa bukan hanya dari unit usaha, tetapi dari arsitektur tata kelola kabupaten yang menopangnya. Novelty artikel ini adalah menempatkan BUM Desa dan Smart Kampung sebagai dua rezim kelembagaan berbeda untuk mendorong ekonomi lokal:

satu berpusat pada penguatan organisasi usaha desa, satu lagi pada digitalisasi ekosistem desa.

Artikel ini berargumen bahwa institusi ekonomi desa menjadi efektif ketika dukungan kabupaten mampu menghubungkan legalitas, pelaporan, pendampingan, dan akses pasar. Tujuan penelitian adalah:

- (1) membandingkan desain penguatan ekonomi desa di Bojonegoro dan Banyuwangi;
- (2) menjelaskan mekanisme yang membuat salah satu model lebih adaptif; dan
- (3) menawarkan proposisi teoretis tentang performa kelembagaan ekonomi desa.

Metode

Penelitian menggunakan studi kasus komparatif pada Kabupaten Bojonegoro dan Banyuwangi. Kasus dipilih karena keduanya dikenal inovatif dalam tata kelola lokal, tetapi menggunakan strategi berbeda untuk penguatan ekonomi desa. Unit analisisnya adalah arsitektur kelembagaan kabupaten dalam menopang institusi ekonomi desa.

Data diperoleh dari portal resmi Kemendesa, situs resmi pemerintah kabupaten, dokumen DPMD, dan pernyataan kebijakan publik 2024–2026. Variabel yang dibandingkan adalah: orientasi kelembagaan, digitalisasi administrasi, pendampingan, keterhubungan ke rantai nilai lokal, dan arah manfaat ekonomi.

Analisis dilakukan dengan membandingkan mekanisme kebijakan dan instrumen institusional, bukan sekadar output formal jumlah BUM Desa.

Hasil dan Diskusi

1. Dari Kuantitas ke Kualitas Kelembagaan

Secara nasional, skala BUM Desa sangat besar. Namun, Kemendesa sendiri menegaskan perlunya pemeringkatan berbasis kelembagaan, manajemen, kemitraan, akuntabilitas, dan manfaat. Ini penting karena menunjukkan bahwa problem pembangunan desa telah bergeser dari pembentukan unit usaha ke kualitas performa institusional (Kemendesa, 2024).

Dalam konteks ini, Bojonegoro menonjol karena secara eksplisit memperkuat administrasi dan pendampingan BUM Desa. SIBUMBo dikembangkan untuk mengubah pelaporan manual menjadi berbasis digital, sementara pemerintah kabupaten juga merekrut 28 pendamping BUM Desa pada 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa Pemkab menempatkan kelembagaan administratif sebagai prasyarat bagi keberlanjutan usaha desa (Bojonegoro, 2025).

2. Penghubung ke Rantai Nilai Lokal

Penguatan administrasi saja tidak cukup bila BUM Desa tidak dihubungkan dengan pasar. Bojonegoro menarik karena mengaitkan BUM Desa dengan program GAYATRI untuk ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah daerah secara eksplisit menyatakan bahwa BUM Desa perlu menyiapkan “ekosistem desa yang mampu menyerap hasil produksi telur secara berkelanjutan melalui skema bisnis lokal.”

Framing ini memperlihatkan pergeseran BUM Desa dari unit formal ke agregator ekonomi lokal (Bojonegoro, 2025).

Banyuwangi menggunakan jalur berbeda. Smart Kampung dikembangkan bukan hanya untuk pelayanan administratif, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi desa. Pemerintah Banyuwangi menyatakan bahwa Smart Kampung adalah instrumen “untuk menggerakkan berbagai sektor di desa,” termasuk ekonomi perdesaan, dan telah diterapkan di 189 desa. Ini menunjukkan bahwa ekonomi lokal di Banyuwangi bertumpu pada integrasi antara layanan digital, pemberdayaan warga, dan fasilitasi usaha desa (Banyuwangi, 2026).

Dengan demikian, Bojonegoro lebih berpusat pada penguatan organisasi usaha desa, sedangkan Banyuwangi lebih menanamkan ekonomi desa ke ekosistem layanan-digital-pemberdayaan.

3. Implikasi bagi Pembangunan Lokal

Temuan studi ini menunjukkan bahwa dua model tersebut menghasilkan logika transformasi berbeda. Model Bojonegoro efektif ketika kabupaten ingin memperkuat BUM Desa sebagai aktor bisnis lokal yang tertata. Model Banyuwangi efektif ketika kabupaten ingin membuat desa menjadi node pelayanan dan pemberdayaan yang lebih luas.

Namun, keduanya memperlihatkan satu pelajaran teoretis yang sama: institusi ekonomi desa tidak akan bekerja jika dibiarkan berdiri sendiri. Mereka membutuhkan dukungan rules, digital backbone, mentoring, dan relasi pasar. Temuan ini memperkuat literatur Ostrom bahwa institusi lokal bekerja ketika terdapat aturan, kepercayaan, dan mekanisme koordinasi yang menurunkan biaya kolektif.

Tabel 4. Bukti Analitis Kelembagaan Ekonomi Desa

Variabel	Temuan Empiris	Bukti (Data/Kutipan)	Interpretasi Analitis
Skala nasional	BUM Desa sudah masif, masalah utama kualitas	Nasional 73.085 BUM Desa/BUM Desa Bersama	Tantangan bergeser dari pembentukan ke performa
Penguatan administrasi	Bojonegoro menonjolkan digital reporting dan pendampingan	SIBUMBo; rekrutmen 28 pendamping BUM Desa	Administrasi digital memperkuat akuntabilitas dan pembelajaran
Keterhubungan ekonomi	Bojonegoro mengaitkan BUM Desa dengan GAYATRI/ketahanan pangan	Skema bisnis lokal menyerap produksi telur	BUM Desa diposisikan sebagai agregator ekonomi lokal
Ekosistem desa	Banyuwangi menautkan digital village dengan ekonomi lokal	Smart Kampung di 189 desa; fokus kesejahteraan sosial-ekonomi	Layanan digital desa menjadi infrastruktur pemberdayaan

4. Proposisi

Proposisi 1: Kinerja ekonomi desa meningkat ketika legalitas dan pelaporan BUM Desa didukung digitalisasi administratif kabupaten.

Proposisi 2: Kelembagaan ekonomi desa menghasilkan dampak lebih besar ketika dihubungkan ke rantai nilai lokal, bukan hanya ke transfer modal.

Proposisi 3: Ekosistem layanan desa berbasis digital memperkuat performa institusi ekonomi lokal bila disertai pemberdayaan pasar dan koordinasi kabupaten.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak dapat direduksi menjadi pembentukan unit BUM Desa semata. Pengalaman Bojonegoro dan Banyuwangi memperlihatkan bahwa performa institusi ekonomi desa ditentukan oleh kualitas ekosistem tata kelola yang menopangnya. Bojonegoro menekankan penguatan organisasi usaha desa melalui pelaporan digital, pendampingan, dan keterhubungan ke program ketahanan pangan. Banyuwangi menonjolkan pendekatan ekosistem, yakni menanamkan kegiatan ekonomi desa ke dalam kerangka Smart Kampung yang menggabungkan layanan publik, digitalisasi, dan pemberdayaan.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah pergeseran dari analisis “eksistensi BUM Desa” menuju “mekanisme performa kelembagaan ekonomi desa”. Kontribusi praktisnya adalah penegasan bahwa pemerintah kabupaten harus membangun dukungan yang lebih komprehensif: legalitas, data, pendampingan, akses pasar, dan intermediasi rantai nilai lokal. Bagi JABER, studi ini relevan karena menunjukkan bagaimana kualitas tata kelola desa memengaruhi produktivitas lokal, penciptaan nilai ekonomi, dan ketahanan komunitas.

Referensi

- Kemendesa. (2024). Peringkat BUM Desa.
- Kemendesa. (2026). Jumlah BUM Desa dan BUM Desa Bersama nasional.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Cambridge University Press.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2026). Smart Kampung Banyuwangi kembali diganjar penghargaan pemerintah pusat.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2026). Smart Kampung Banyuwangi gerakkan ekonomi lokal.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025). Optimalkan penyusunan profil dan laporan keuangan BUM Desa secara digital melalui SIBUMBo.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025). Rekrutmen pendamping BUM Desa tahun 2025.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025). Puluhan BUM Desa dilatih ikut kelola GAYATRI untuk wujudkan ketahanan pangan warga.
- Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104.

Torfin, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2021). Collaborative innovation in the public sector. Georgetown University Press.

World Bank. (2024). Rural institutions and local economic transformation. World Bank.